DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PERSEMBAHAN ii
LEMBAR PENGESAHAN iii
LEMBAR PERNYATAAN iv
ABSTRAK v
ABSTRACT vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TABEL xiv
DAFTAR GAMBAR xv
DAFTAR LAMPIRAN xvi

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Rumusan Masalah 8
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 8
1.4 Kegunaan Penelitian 9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN 11
2.1 Tinjauan Pustaka 11
2.1.1 Analisis Kebijakan 11
2.1.1.1 Analisis 13
2.1.1.2 Macam-Macam Analisis 14
2.1.1.2 Kebijakan 15
2.1.1.4 Ciri-ciri Analisis Kebijakan 17
2.1.2 Tenaga Honorer 19
2.1.2.1 Honorer APBD/APBN 22
2.1.2.2 Honorer Non APBD/APBN 23
2.1.3 Pegawai Negeri Sipil Daerah 24
2.1.3.1 Tugas dan Fungsi Pegawai Negeri Sipil 27

2.1.3.2 Kedudukan Pegawai Negeri Sipil 29
2.1.3.3 Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil 30
2.1.3.4 Gaji 31
2.1.3.5 Cuti 32
2.1.3.6 Tunjangan Kesehatan 32
2.1.3.7 Tunjangan Cacat dan Uang Duka 32
2.1.3.8 Kenaikan Pangkat 33
2.1.3.9 Pensiun 33
2.2 Kerangka Pemikiran 34
BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN 41
3.1 Objek Penelitian 41
3.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Bandung 41
3.1.1.1 Sejarah Kabupaten Bandung 41
3.1.1.2 Visi dan Misi Kabupaten Bandung 43
3.1.2 Sejarah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung 44
3.1.2.1 Visi dan Misi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pemerintah Daerah Bandung 45
3.1.2.2 Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung 47
3.1.2.3 Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung 48
3.1.2.3.1 Kepala Badan 48
3.1.2.3.2 Sekretaris 49
3.1.2.3.2.1 Sub Bagian Penyusunan Program 51
3.1.2.3.2.2 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 52

3.1.2.3.2.3 Sub Bagian Keuangan 54
3.1.2.3.3 Bidang Umum Kepegawaian 56
3.1.2.3.3.1 Sub Bidang Formasi..... 57
3.1.2.3.3.2 Sub Bidang Data dan Informasi Pegawai..... 58
3.1.2.3.4 Bidang Mutasi 59
3.1.2.3.5 Bidang Pengadaan dan Pemindahan..... 61
3.1.2.3.6 Bidang Kepangkatan dan Pensiun 62
3.1.3 Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pelatihan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung..... 63
3.1.4 Gambaran Umum Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS 70
3.2 Metode Penelitian..... 77
3.2.1 Desain Penelitian 78
3.2.2 Teknik Pengumpulan Data 78
3.2.2.1 Studi Pustaka 78
3.2.2.2 Studi Lapangan 79
3.2.3 Teknik Penentuan Informan 80
3.2.4 Teknik Analisa Data 82
3.2.5 Lokasi dan Waktu Penelitian..... 84
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 85
4.1 Proses Pengkajian Kebijakan Tentang Pengangkatan Status Tenaga Honorer Menjadi CPNS Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung 86
4.1.1 Metodologi Kebijakan Tentang Pengangkatan Status Tenaga Honorer Menjadi CPNS Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung..... 88
4.1.2 Informasi Kebijakan Tentang Pengangkatan Status Tenaga Honorer Menjadi CPNS Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung..... 93

4.1.3 Prosedur Kebijakan Tentang Pengangkatan Status Tenaga Honorer Menjadi CPNS Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung..... 98
4.2 Proses Pembuatan Kebijakan Tentang Pengangkatan Status Tenaga Honorer Menjadi CPNS Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung 104
4.2.1 Perumusah Masalah Kebijakan Tentang Pengangkatan Status Tenaga Honorer Menjadi CPNS Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung..... 105
4.2.2.Peramalan Kebijakan Tentang Pengangkatan Status Tenaga Honorer Menjadi CPNS Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung..... 111
4.2.3 Rekomendasi Kebijakan Tentang Pengangkatan Status Tenaga Honorer Menjadi CPNS Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung..... 117
4.2.4 Pemantauan Kebijakan Tentang Pengangkatan Status Tenaga Honorer Menjadi CPNS Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung..... 122
4.2.5 Evaluasi Kebijakan Tentang Pengangkatan Status Tenaga Honorer Menjadi CPNS Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung 125
4.3 Proses Komunikasi Kebijakan Tentang Pengangkatan Status Tenaga Honorer Menjadi CPNS Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung 131
4.3.1 Dokumen Kebijakan Tentang Pengangkatan Status Tenaga Honorer Menjadi CPNS Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung..... 133
4.3.2 Presentasi Kebijakan Tentang Pengangkatan Status Tenaga Honorer Menjadi CPNS Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung..... 136

4.3.3 Penggunaan Pengetahuan Kebijakan Tentang Pengangkatan Status Tenaga Honorer Menjadi CPNS Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung..... 139
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 143
5.1 Kesimpulan 143
5.2 Saran 144
DAFTAR PUSTAKA 145
LAMPIRAN-LAMPIRAN 148

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 3.1 Data Jumlah Hasil Verifikasi Dan Validasi Tenaga Honorer Menjadi CPNS 76

Tabel 3.2 Jadwal dan Lokasi Penelitian 84

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.2 KerangkaPemikiran..... 40
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung 64
Gambar 3.2 Grafik Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan Pangkat Pemerintah Daerah Daerah Kabupaten Bandung..... 65
Gambar 3.3 Grafik Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung 66
Gambar 3.4 Grafik Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenis Kelamin Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung 67
Gambar 3.5 Grafik Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pendidikan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung 68
Gambar 3.6 Grafik Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Agama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung 69

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1 Pedoman Wawancara Aparatur 148
Lampiran 2 Pedoman Wawancara Tenaga Honorer 150
Lampiran 3 Dokumentasi 152
Lampiran 4 Daftar Informan 153
Lampiran 5 Transkip Wawancara 155
Lampiran 6 Surat Ijin Penelitian 157
Lampiran 7 Surat Telah Di Terima Penelitian 158
Lampiran 8 Surat Telah Melaksanakan Penelitian 159
Lampiran 9 Riwayat Hidup 160